

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

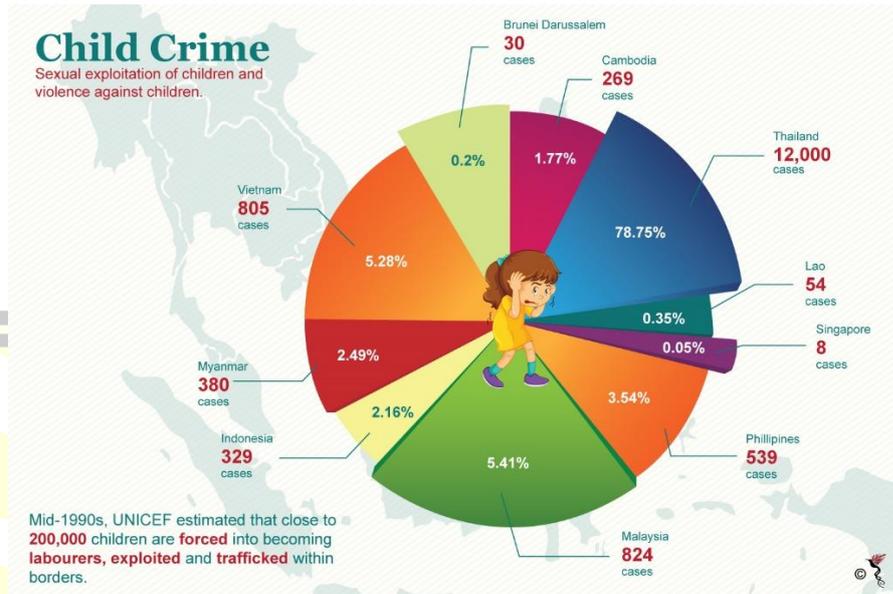
Thailand merupakan tujuan wisata global paling terkenal di dunia. Selain menarik wisatawan dengan kekayaan alam dan budayanya, industri pariwisata seks yang berkembang pesat di Thailand juga menarik ribuan wisatawan seks dari berbagai penjuru dunia. Menurut Indeks Perbudakan Global 2018, yang diterbitkan oleh organisasi Hak Asasi Manusia Australia, Thailand memiliki sekitar 610.000 korban perdagangan manusia. Menurut Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), mayoritas korban diperdagangkan untuk kerja paksa, namun sebagian perempuan dan anak perempuan dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks.¹

Transaksi seksual di kawasan wisata tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak-anak, yang dikenal sebagai Pariwisata Seks Anak (PSA). PSA merujuk pada perjalanan individu atau kelompok untuk melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur.² Menurut United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), pada tahun 2016, Thailand mencatatkan jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak tertinggi di ASEAN pada tahun 2016, dengan 12.000 kasus.³

¹ EL PAIS, "Thailand is a global capital of (illegal) sex work", diakses pada 10 November 2023 <https://english.elpais.com/international/2023-06-11/thailand-is-a-global-capital-of-illegal-sex-work.html>

² UNICEF, "Analisis situasi eksploitasi seksual komersial anak Thailand", https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/SITAN_THAILAND_ENG_FINAL.pdf, diakses pada 10 November 2023

³ The ASEAN Post Team, "Combating Child Sex Abuse – Is ASEAN Doing Enough?", <https://theaseanpost.com/article/combating-child-sex-abuse-asean-doing-enough>, diakses pada 10 November 2023



Gambar 1 Apakah Tindakan ASEAN Cukup Dalam Memerangi Pelecehan Seksual pada Anak?

Sumber : The Asean Post Team

Sebagian besar perdagangan anak di Asia Tenggara bersifat intra-regional dan melibatkan sejumlah anak yang diperdagangkan dari negara-negara kurang berkembang ke negara-negara maju seperti Thailand. Menurut laporan Perdagangan Manusia di AS pada tahun 2016, perempuan dan anak perempuan terus diperdagangkan dari Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam ke Thailand untuk tujuan eksploitasi seksual.⁴ Faktor ekonomi dan sosial seperti kemiskinan, migrasi, keadaan tanpa kewarganegaraan, dan status pengungsi memainkan peran penting dalam meningkatkan kerentanan anak terhadap perdagangan orang.⁵ Prostitusi di Thailand juga sangat sulit untuk dihapus karena Pemerintah Thailand berfokus pada industri dan jasa, sementara mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, yang menyebabkan kemiskinan. Selain itu, terdapat konstruksi sosial yang

⁴ Wongboonsin, P., Perdagangan untuk Eksploitasi Seksual ke Thailand Selatan, (Bangkok: Institute of Studi Asia Universitas Chulalongkorn, 2008), 55-56

⁵ ECPAT, "An Uphill Battle: Child Trafficking Survivors in Thailand Struggle for Justice", <https://ecpat.org/story/an-uphill-battle-child-trafficking-survivors-in-thailand-struggle-for-justice/>, diakses pada 12 November 2023

menempatkan perempuan sebagai tulang punggung keluarga, sehingga jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, mereka dianggap gagal oleh keluarga maupun masyarakat sekitar.⁶ Wisatawan asing yang terlibat dalam Pariwisata Seks Anak (PSA) di Thailand melanggar Konvensi Hak Anak (CRC) tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh Thailand pada tahun 1992. Dari sisi penegakan hukum, prostitusi di Thailand merupakan tindakan ilegal dan dikategorikan sebagai tindakan kriminal berdasarkan konstitusi yang diperkenalkan pada tahun 2007.⁷ Namun, kenyataannya angka-angka menunjukkan bahwa pendekatan melalui status ilegal tersebut tidak efektif, dengan perkiraan jumlah pekerja seks di Thailand mencapai antara 800.000 hingga lebih dari 2 juta orang, dan banyak dari mereka berusia di bawah 18 tahun.⁸

Masalah Pariwisata Seks Anak (PSA) di Thailand telah menarik perhatian End Child Prostitution and Trafficking for Sexual Purposes (ECPAT), sebuah organisasi non-pemerintah yang memiliki visi dan misi untuk melindungi hak-hak anak dari eksploitasi seksual. Kampanye global ECPAT awalnya diluncurkan pada bulan Mei 1990, ketika sekelompok kecil orang yang peduli terhadap isu eksploitasi seksual anak berkumpul di Chiang Mai di Thailand Utara.⁹ Sejak awal adanya ECPAT, organisasi ini telah bekerja sama dengan industri pariwisata dan agen travel dalam mengurangi wisatawan seks yang masuk ke Thailand. Pada tahun 2022,

⁶ UNICEF, “Analisis situasi eksploitasi seksual komersial anak Thailand” , https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/SITAN_THAILAND_ENG_FINAL.pdf, diakses pada 12 November 2023

⁷ Roy, A. G. “Prostitution in Thailand. International Journal of Engineering and Management Research”, 7(1), 1-5, diakses pada 12 November 2023 www.ijemr.net

⁸ The Nation Thailand. “Time to rethink prostitution ban, say experts”, <https://www.nationthailand.com/in-focus/30353452>, diakses pada 12 November 2023

⁹ Rizky, A. R. Kontribusi ECPAT terhadap aktifitas Sex Tourism di Brazil tahun 2012-2014. Jom FISIP, 2(1), 2015: 1–10

Thailand menerima 11,15 juta wisatawan mancanegara (wisman), meningkat drastis dari sekitar 428.000 pada tahun sebelumnya ketika pembatasan perjalanan diberlakukan.¹⁰ Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, peluang untuk aktivitas pariwisata seks juga meningkat. Oleh karena itu, ECPAT memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk melindungi warga, terutama perempuan dan anak-anak. ECPAT juga membentuk opini publik yang kuat dengan melibatkan masyarakat umum, mahasiswa, dan aktivis, sehingga dapat menciptakan kepentingan kolektif yang mendorong pemerintah Thailand untuk lebih peduli dalam menangani kasus pariwisata seks anak, terutama di kota-kota besar.¹¹

ECPAT membangun opini publik yang kuat dengan melibatkan masyarakat umum, mahasiswa, dan aktivis, sehingga mampu menciptakan kepentingan bersama yang mendorong pemerintah Thailand untuk lebih peduli dalam menangani kasus pariwisata seks anak, terutama di kota-kota besar. Salah satu strategi ECPAT dalam meningkatkan kesadaran tentang isu pariwisata seks anak adalah dengan memanfaatkan media kontemporer dan teknologi, serta meluncurkan kampanye masif bertajuk "Make It Safe". Dalam kampanye yang berlangsung selama tiga tahun ini, ECPAT bekerja sama dengan perusahaan ternama The Body Shop, yang berbasis di London dan berdedikasi untuk menciptakan perubahan sosial yang positif. Dalam tiga tahun, kampanye ini berhasil mengumpulkan 3 juta dolar penjualan produk krim tangan 'Soft Hand Kind Heart' dan dana tersebut secara

¹⁰ Kontan. "Thailand Melampaui Target Pariwisata 2022 Dengan 11,15 Juta Kedatangan Wisman", Thailand Melampaui Target Pariwisata 2022 Dengan 11,15 Juta Kedatangan Wisman (kontan.co.id), diakses pada 15 November 2023

¹¹ ECPAT International. "About ECPAT". <https://www.ecpat.org/about-ecpat/>, diakses pada 10 November 2023

penuh resmi masuk ke dalam ECPAT dan mitra kerja sama. Dana ini digunakan untuk menciptakan Global Youth Partnership Project (YPP) yang dilaksanakan di Chiang Rai, di mana program ini berhasil mengumpulkan 15.000 tanda tangan warga Thailand mendukung perjuangan melawan PSA. Kemudian bukti ini dikumpulkan oleh ECPAT sebagai alat advokasi ECPAT menentang pemerintah Thailand.¹² ECPAT sebagai organisasi non-pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pariwisata seks anak (PSA). Namun upaya tersebut tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap PSA di Thailand. Hal ini ditunjukkan dengan laporan *Disrupting Harm* di Thailand yang diterbitkan bersama UNICEF, ECPAT dan INTERPOL pada tahun 2022, sekitar 400.000 anak di Thailand berusia antara 12 sampai 17 tahun menjadi korban eksploitasi dan pelecehan seksual, termasuk kasus PSA.¹³

Jomdet, seorang profesor kriminologi dari Universitas Rangsit mengemukakan bahwa tempat acara di Thailand dengan mudah menghasilkan 10 juta Bath perbulan dan sebagian kecil digunakan untuk menyuap penegak hukum. Biasanya suap dimulai dari harga Rp. 87.037.000 per bulan dan bisa mencapai 400,000 Baht. Kondisi tersebut memperlihatkan status ilegal yang diberikan pemerintah pada industri prostitusi sehingga menjadi salah satu penghambat ECPAT dalam menangani PSA di Thailand.¹⁴

¹² ECPAT."Global Monitoring : status of action against commercial sexual exploitation of children Thailand". 2011, hal. 26

¹³ UNICEF." Thai Government and UNICEF step up efforts to curb disturbing rise in child online sexual exploitation and abuse".2022. Diakses pada 9 November 2023, <https://www.unicef.org/thailand/press-releases/unicef-msdhs-thailand-safe-internet-coalition-campaign-warns-children-think-twice>, diakses pada 10 November 2023

¹⁴ ECPAT Foundation. "Executive summary Thailand", http://www.ecpat.net/sites/default/files/exsum_a4a_eap_thailand.pdf, diakses pada 10 November 2023

1.2. Rumusan Masalah

Sektor pariwisata telah memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Thailand. Salah satu jenis pariwisata yang menjadi andalan di Thailand adalah pariwisata seks yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan asing. Namun fakta tersebut bertolak belakang dengan upaya-upaya pemerintah Thailand dalam menegakkan hak asasi manusia di negara Thailand. Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang masih sering terjadi di Thailand adalah Pariwisata Seks Anak (PSA). Pemerintah Thailand dianggap gagal dalam menangani permasalahan PSA tersebut, sehingga hal ini membuat organisasi non-pemerintah yang peduli dengan penegakan hak asasi anak turun tangan, yaitu ECPAT (End Child Prostitution Pornography And Trafficking). Namun angka PSA di Thailand justru meningkat setiap tahunnya, sehingga ECPAT dinilai belum berhasil dan memiliki kendala dalam mengatasi PSA di Thailand.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi pertanyaan dari penelitian ini adalah ‘Faktor apa yang menjadi hambatan End Child Prostitution Pornography And Trafficking (ECPAT) dalam menangani kasus Pariwisata Seks Anak di Thailand?’

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Mendeskripsikan fenomena Pariwisata Seks Anak (PSA) di Thailand dan dampak sosial dari fenomena tersebut
- b) Menganalisis hambatan ECPAT dalam menangani masalah Pariwisata Seks

Anak (PSA) di Thailand.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi pada studi HI, terkhususnya pada kajian peran organisasi internasional dalam menganggulangi isu-isu transnational, di mana dalam penelitian ini dipresentasikan oleh ECPAT dalam menanggulangi masalah PSA di Thailand. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan hubungan internasional.

1.5.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah dalam mengatasi masalah serupa yang terjadi di Thailand dengan menggabungkan seks dan industri pariwisata.

1.6 Studi Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi tertulis sebagai studi literatur dari beberapa peneliti yang menulis atau meneliti topik yang sama terkait Pariwisata Seks Anak(PSA).

Pertama, jurnal dari Eka Mulyani Lestari yaitu “Peran ECPAT dalam Menangani CSEC oleh Wisatawan Asing di Thailand”.¹⁵ Dalam jurnal ini penulis mengatakan bahwa Commercial Sexual Exploitation of the Childrend (CSEC) merupakan salah satu dampak negatif setelah dibukanya pariwisata di Thailand.

Wisatawan asing yang datang secara sengaja menjadikan anak-anak sebagai objek seks yang bersifat komersil. CSEC oleh wisatawan asing diperburuk oleh adanya

¹⁵ Eka Mulyani Lestari, “Peran ECPAT dalam Menangani CSEC oleh Wisatawan Asing di Thailand”. eJournal Hubungan Internasional, 2015: vol.1 no.03.

stigma Thailand sebagai negara child sex tourism terbesar di dunia. Sehingga masalah CSEC ini mendapatkan perhatian dari ECPAT sebagai NGO yang mana dalam visi misinya ECPAT berupaya mencegah dan menciptakan lingkungan anak yang bebas dari CSEC. Selain itu, dalam menjalankan perannya sebagai agenda setter, educator dan counterpart, ECPAT juga menggunakan strategi yang menyoal kepada pihak yang memiliki kepentingan dalam usaha menangani CSEC oleh wisatawan. Tiga peran inilah yang menjadi fokus utama ECPAT dalam menjalankan perannya di Thailand. Perbedaannya dengan penelitian peneliti adalah pada studi kasusnya, dimana dalam artikel jurnal ini membahas peran ECPAT khususnya menangani masalah Commercial Sexual Exploitation of the Childrend (CSEC) wisatawan asing di Thailand, sedangkan peneliti membahas peran ECPAT khususnya menangani masalah isu pariwisata seks anak di Thailand.

Kedua, dalam penelitian Peran ECPAT Dalam Menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia oleh Amila Hasya Millatina¹⁶. Penelitian ini membahas mengenai ECPAT telah memberikan perannya dalam menangani kasus tersebut. Menggunakan konsep Civil Society Organization (CSO), ECPAT disebutkan memiliki tiga peran, yaitu sebagai *agenda setter*, *educator*, dan *counterparts*. Pada perannya sebagai *agenda setter*, ECPAT memunculkan kesadaran dari berbagai pihak yang terkait, baik pemerintah, masyarakat umum, maupun sektor privat bahwa PSA benar terjadi di Indonesia dan merupakan sebuah masalah yang serius. Kemudian selanjutnya peran sebagai educator, ECPAT memberikan pendidikan tentang pentingnya memenuhi hak-hak anak dan

¹⁶ Amila Hasya Millatina, "Peran ECPAT Dalam Menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia", *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 3, 2018, hal. 536-546.

melindungi anak-anak dari segala bentuk praktik ESKA kepada semua pihak yang dapat turut serta dalam menyelesaikan masalah ESKA di Indonesia.

Lalu peran terakhir yang dijalankan ECPAT dalam menangani kejahatan PSA yaitu peran sebagai counterpart, dimana di bagian ini ECPAT menjadi rekanan pemerintah dalam usaha menangani PSA. Pada peran ini ECPAT tidak menjustifikasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia terhadap penanganan ESKA. Namun ECPAT lebih kepada memberi dalam bentuk kerjasama, usulan dan monitoring dalam usaha membantu pemerintah Indonesia dalam meningkatkan usaha penanganan ESKA. Perbedaannya dengan penelitian peneliti adalah pada studi kasusnya, di mana dalam artikel jurnal ini membahas peran membahas peran ECPAT khususnya menangani masalah ESKA di Indonesia, sedangkan peneliti lebih membahas hambatan ECPAT khususnya menangani masalah Pariwisata Seks Anak (PSA) di Thailand.

Penelitian ketiga adalah artikel jurnal dari *Business & Human Rights Resource Centre*. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa Pariwisata seks anak merupakan permasalahan serius yang berdampak pada anak-anak rentan di berbagai belahan dunia, termasuk Thailand. Beberapa bisnis dengan sadar mempromosikan dan memfasilitasi wisata seks, sementara bisnis lainnya mengoperasikan tempat di mana para pelaku kekerasan mengeksploitasi anak-anak. Ini termasuk fasilitas akomodasi, pusat hiburan, dan area rekreasi.

Selain itu, studi yang dilakukan ECPAT Internasional menyoroti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pariwisata seks anak di Asia Timur dan Tenggara. Baik industri perjalanan maupun industri TI telah menyaksikan peningkatan eksploitasi seksual terhadap anak-anak melalui media yang mereka

sediakan.¹⁷ Berbagai upaya mendorong industri pariwisata untuk berkolaborasi melawan pariwisata seks anak. Bisnis yang beroperasi di sektor ini tidak boleh mengabaikan masalah ini. Penting bagi industri perjalanan untuk secara aktif memerangi pariwisata seks anak dan melindungi anak-anak yang rentan.

Selanjutnya, Studi pustaka keempat yang penulis gunakan yaitu artikel jurnal dari Amanda Riri Rizki, “Kontribusi ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking) Terhadap Aktifitas *Sex Tourism* di Brazil Tahun (2012-2014)”.¹⁸ Dalam jurnal ini penulis membahas tentang pariwisata seks anak yang terjadi di Brazil. Bertepatan dengan kebangkitan pariwisata Brazil sebagai mesin propaganda besar memulai mempromosikan Brazil di luar negeri dan seringkali menggunakan eksploitasi dari produk lokal, “Brazil Mulata”. Meskipun pemerintah Brazil telah secara radikal mengubah strategi iklannya, pariwisata seks masih merupakan masalah pada lokasi wisata Brazil. Tidak hanya itu saja, aktifitas seks di disektor pariwisata di Brazil juga mengalami lonjakan yang dapat dilihat ketika diselenggarakannya piala dunia 2014.

Berbagai aksi yang telah dilakukan dalam industri pariwisata yaitu melakukan kerjasama ECPAT, UNWTO, dengan LSM lokal untuk menentang sex tourism dapat dibagi dalam dua langkah: pertama, langkah-langkah yang dikembangkan di negara-negara pengiriman wisatawan dan kedua, langkah-langkah yang dilakukan di negara-negara penerima wisatawan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mempromosikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Perbedaanya dengan

¹⁷ Business & Human Rights Resource Centre, “*Child sex tourism – the hidden danger of a free, fast-growing Web*”, <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/child-sex-tourism-the-hidden-danger-of-a-free-fast-growing-web/>, diakses pada 20 November 2023

¹⁸ Amanda Riri Rizky, “Kontribusi ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking) Terhadap Aktifitas Sex Tourism di Brazil Tahun (2012-2014)”.Universitas Riau, (2015), vol.2

penelitian peneliti adalah pada studi kasusnya, dimana dalam jurnal ini Brazil sebagai mesin propaganda besar mempromosikan eksploitasi anak ke luar negeri, sedangkan penelitian ini karena melonjaknya pariwisata di Thailand.

Studi pustaka terakhir adalah artikel jurnal yang berjudul Peran ECPAT dalam Menangani PSA di Indonesia (Studi Kasus: Bali) yang ditulis oleh Alwafi Ridho Subarkah, pada artikel jurnal ini menjelaskan bahwa child sex tourism itu masih banyak di Indonesia, pada jurnal ini juga menampilkan data per 2016 sehingga penulis dapat melihat bagaimana perkembangan dari kasus tersebut. Karena eksploitasi seksual dapat terjadi, yang pelakunya adalah wisatawan yang sedang berkunjung, maka artikel jurnal ini menjelaskan bagaimana peran ECPAT dalam mengatasi kasus-kasus tersebut, yaitu dengan memberantas eksploitasi seksual terhadap anak melalui penegakan hukum, rehabilitasi, dan sosialisasi. Namun, di akhir artikel jurnal tersebut, disebutkan bahwa pariwisata seks anak dapat terjadi karena kurangnya pendidikan atau kesadaran di kalangan masyarakat umum tentang eksploitasi seksual terhadap anak dan kurangnya komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum.¹⁹

Artikel jurnal ini dapat membantu penulis untuk memahami dalam kasus child sex tourism di Indonesia terutama di pada daerah Bali, bagaimana peran ECPAT di Bali. Perbedaan dalam tulisan yang dibuat oleh peneliti adalah bagaimana hambatan ECPAT di Thailand dalam menanggapi kasus PSA di Thailand secara keseluruhan. Pada penelitian ini peneliti fokus dalam tindakan nyata ECPAT lebih banyak

¹⁹ Alwafi Ridho Subarkah, "Peran ECPAT Dalam Menangani Child Sex Tourism Di Indonesia (Studi Kasus: Bali)," *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 2, no. 1 (2018): 67. Diakses pada 5 Februari 2024 pada link <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=922517&val=12382&title=Peran>

menekankan pentingnya tindakan nyata untuk melawan PSA, misalnya melalui kampanye pemberdayaan masyarakat lokal, pelatihan untuk industri pariwisata, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan bagi korban PSA.²⁰

1.7. Kerangka Konseptual

1.7.1 Organisasi Internasional

Peneliti akan menerapkan konsep organisasi internasional untuk menganalisis hambatan yang dihadapi ECPAT dalam memerangi PSA di Thailand. Teori yang digunakan yaitu teori dari Clive Archer tentang Organisasi Internasional, yaitu struktur formal yang dibentuk melalui persetujuan bersama dari pemerintah dan lembaga non-pemerintah dari berbagai negara yang berdaulat, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama dan menciptakan perdamaian serta keamanan global. Menurut Archer, salah satu peran organisasi internasional yaitu sebagai pelaku (aktor), bahwa organisasi internasional juga bisa merupakan aktor yang otonom dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya. Organisasi Internasional dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu.²¹:

1. Organisasi antar Pemerintah atau Inter-Governmental Organizations (IGO). Organisasi ini beranggotakan delegasi resmi pemerintah negara-negara. Contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Badan-Badan Internasional dibawah PBB seperti ILO, UNICEF, UNESCO.

²⁰ Alwafi Ridho Subarkah, "Peran ECPAT Dalam Menangani Child Sex Tourism Di Indonesia (Studi Kasus: Bali)," *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 2, no. 1 (2018): 67.

²¹ Definisi Organisasi Internasional ", <http://www.portal-hi.net/definisi-organisasi-inter/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024.

2. Organisasi Non-Pemerintah atau Non-Governmental Organizations (NGO). Organisasi ini beranggotakan kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, kemanusiaan, kebudayaan, bantuan teknik atau bantuan ekonomi. Contohnya adalah ECPAT, Palang Merah Internasional, GreenPeace.

Menurut Clive Archer dalam bukunya yang berjudul *International Organizations*, peranan organisasi internasional dibagi menjadi tiga kategori, yaitu.²² :

a) Instrumen (alat/sarana), suatu organisasi internasional digunakan sebagai instrumen kebijakan dalam/luar negeri dari negara-negara anggota suatu organisasi tersebut.

b) Arena (forum/ wadah), sebagai salah satu organisasi internasional, peran sebagai arena ialah bahwa suatu organisasi internasional dapat menyediakan suatu forum dimana setiap anggota organisasi dapat berkumpul serta membahas isu-isu masalah yang kemudian menghasilkan persetujuan atau penolakan.

c) Pelaku (aktor), pengertian organisasi internasional sebagai aktor ialah setiap organisasi internasional ialah suatu entitas atau wujud dari aktor yang independen. Pengertian dari independen disini berarti bahwa suatu organisasi internasional dapat melakukan serangkaian kebijakan dan pembuatan keputusan tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak luar.

Dalam perkembangannya, Organisasi Internasional dibagi menjadi beberapa bidang kegiatan, contohnya ECPAT yang bergerak di bidang kemanusiaan. Seperti dikatakan di atas bahwa suatu organisasi internasional muncul dikarenakan adanya persetujuan ataupun perjanjian internasional dari

²² Cliver Archer. 2001. "International Organization". Routledge 11 New Fetter Lane, London. Hal. 68.

anggota ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dan mendukung adanya organisasi tersebut karena memang mereka merasa dengan adanya organisasi tersebut karena memang mereka merasa dengan adanya organisasi internasional tersebut dapat membantu ataupun meringankan masalah yang tengah dihadapi.²³

ECPAT termasuk jenis Non Government Organization atau Organisasi Non Pemerintah. Karena hal ini tertera dalam laman website ECPAT dan sudah diakui oleh Lembaga UNICEF maupun PBB.²⁴ Namun dalam setiap bentuk kerjasama, berbagai hambatan dapat muncul, seperti friksi antarnegara dan miskomunikasi, yang dapat membahayakan kondisi suatu organisasi internasional. Hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh organisasi internasional dalam menjalankan fungsinya meliputi.²⁵ :

a. **Hambatan Regulasi:** Hambatan ini mencakup kerangka, arah kebijakan, dan peraturan yang tidak jelas, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, tumpang tindih aturan dalam kesepakatan, serta struktur yang tidak terdefinisi dengan baik.

b. **Hambatan Institusional:** Tidak adanya badan arbitrase untuk menyelesaikan konflik antar anggota, terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam organisasi, serta kurangnya koordinasi baik di antara anggota maupun antar organisasi internasional.

²³ Cliver Archer. 2001. "International Organization". Routledge 11 New Fetter Lane, London. Hal. 92.

²⁴ Ecpat International, www.ecpat.org, diakses pada 12 Agustus 2024.

²⁵ Syahmin, A. K. *Masalah-masalah aktual hukum organisasi internasional*. CV Armico, 1988, halaman 209.

c. **Hambatan Lingkungan:** Meliputi kondisi internal dan eksternal organisasi internasional serta situasi masyarakat internasional yang lebih luas.

d. **Hambatan Birokrasi:** Ditandai dengan struktur organisasi yang sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur standar.

e. **Hambatan Politis:** Terbatasnya kedaulatan yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota organisasi internasional.

f. **Hambatan Keuangan:** Meliputi keterbatasan waktu, pendanaan, dan sumber daya dalam menjalankan operasional organisasi internasional. Untuk mengatasi hambatan ini, penting untuk melibatkan partisipasi dan rasa kebersamaan di antara anggota, serta membagi beban secara adil.

Dalam konteks ini, hambatan ECPAT dalam mengatasi PSA di Thailand dapat dilihat dari 6 konsep di atas, yaitu hambatan regulasi, institusional, lingkungan, birokrasi, politis dan hambatan keuangan. Peneliti melihat bahwa NGO seperti ECPAT memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dan membangun kerjasama internasional untuk memerangi pariwisata seks anak. Namun, keberhasilan mereka tergantung pada sejauh mana pemerintah Thailand bersedia mengesampingkan tujuan individual dan egois untuk fokus pada kerjasama bersama. Dengan memahami hambatan yang dihadapi ECPAT, kita dapat mengidentifikasi area kerjasama yang perlu diperkuat. Oleh karena itu, pendekatan organisasi internasional dapat membantu menguraikan bagaimana ECPAT dan NGO lainnya dapat lebih efektif dalam bekerja sama dengan pemerintah Thailand untuk mengatasi pariwisata seks anak di Thailand.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian cara secara sistematis yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan penelitian dengan memberikan jabaran gagasan terkait mengapa penelitian dilakukan.²⁶ Peneliti menggunakan metode kualitatif karena metode ini efektif untuk menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau karakteristik fenomena sosial yang sulit diukur atau dideskripsikan secara kuantitatif. Penelitian ini didasarkan pada data yang dikumpulkan melalui berbagai media.

Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children For Sexual Purposes (ECPAT) dalam menangani Pariwisata Seks Anak (PSA) di Thailand secara deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan masalah yang diteliti. Temuan penelitian akan memberikan deskripsi rinci tentang masalah atau respons terhadap pertanyaan penelitian.²⁷ Penelitian ini melihat hambatan ECPAT dalam menangani kasus-kasus Pariwisata Seks Anak (PSA) dengan menggunakan konsep hambatan dalam organisasi internasional.

1.8.2 Batasan Masalah

Untuk membatasi penelitian ini, peneliti mengambil rentang waktu dari tahun 2016 hingga 2022. Tahun 2016 merupakan tahun dimana kasus-kasus pariwisata seks anak di Thailand meningkat. Sepanjang tahun 2016-2022, ECPAT terus berupaya melakukan penanganan dan pendampingan terhadap kasus

²⁶ Prof Dr Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Google Books (Grasindo).

²⁷ William L. Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Edinburgh: Pearson, 2014: hal. 38-39).

Pariwisata Seks Anak (PSA) di Thailand.

1.8.3 Unit Analisis dan Unit Eksplanasi

Menurut Mochtar Mas'oeed, unit analisis adalah unit yang perilakunya akan diteliti atau yang dikenal dengan variabel dependen.²⁸ Sedangkan unit eksplanasi adalah unit yang dapat mempengaruhi perilaku variabel dependen atau unit analisis atau disebut juga dengan variabel independen. Berdasarkan pemaparan di atas, maka unit analisa dalam penelitian ini adalah ECPAT, unit eksplanasinya adalah pariwisata seks anak di Thailand. Sedangkan level analisa adalah kerangka kerja yang digunakan untuk membantu peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti. Sesuai dengan konteks penelitian ini, maka level analisa dari penelitian ini adalah Negara Thailand.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelitian kepustakaan atau *library research*.²⁹ Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari berbagai sumber, khususnya penelitian terdahulu, buku, jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Berdasarkan banyaknya sumber informasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, maka peneliti akan memilih sumber-sumber yang dianggap paling sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1.8.5 Teknik Analisis Data

²⁸ Mohtar, Mas'oeed. *Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial 1998). Hlm. 36

²⁹ Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 31.

Metode analisis data adalah metode pengumpulan data yang mengharuskan pengorganisasian dan pengajuan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar untuk menemukan dan merumuskan teori. Analisis data adalah proses mereduksi data agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁰ Peneliti menganalisis data yang dianggap sesuai dan memiliki keterkaitan satu sama lain berdasarkan data yang telah disajikan di atas.

Peneliti akan melakukan analisis data dari data yang berkaitan dengan penelitian. Dalam menganalisis data, peneliti akan menjabarkan hambatan ECPAT Thailand sehingga bagaimana Thailand mengurangi kejahatan seksual pada anak atau Pariwisata Seks Anak (PSA). Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti akan menganalisis apa hambatan dari ECPAT Thailand dalam mengatasi kasus Pariwisata Seks Anak (PSA) di Thailand menggunakan Organisasi Internasional. Berikut tahapan analisis data yang disederhanakan oleh peneliti, yaitu:

1. Mencari dan mengumpulkan data mengenai kasus Pariwisata Seks Anak (PSA) di Thailand, bagaimana kebijakan pemerintah di Thailand mengenai kasus Pariwisata Seks Anak (PSA). Kerjasama ECPAT Thailand dengan pemerintah dan masyarakat di Thailand dalam mengurangi kasus Pariwisata Seks Anak (PSA) di Thailand melalui strategi ECPAT tersebut, serta hambatan ECPAT dalam mengurangi kasus Pariwisata Seks Anak (PSA)
2. Menganalisis penelitian melalui konsep Organisasi Internasional

³⁰ Bakai, "Pengertian, Macam, Dan Langkah-Langkah Dari Teknik Analisis Data – Biro Administrasi Kemahasiswaan, Alumni Dan Informasi," diakses pada 8 Juni 2023, <https://bakai.uma.ac.id/2022/01/27/pengertian-macam-dan-langkah-langkah-dari-teknik-analisis-data/>.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis hambatan ECPAT Thailand dalam mengatasi kasus Pariwisata Seks Anak (PSA) di Thailand dengan konsep Organisasi Internasional

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, teori, kajian pustaka, serta metodologi yang digunakan pada penelitian yang ingin dilakukan serta sistematika penulisan selanjutnya.

BAB II FENOMENA KASUS PARIWISATA SEKS ANAK DI THAILAND

Pada bab ini, peneliti menjelaskan kondisi, faktor dan dampak pariwisata seks anak serta upaya pemerintah dalam mengatasi isu ini.

BAB III ECPAT INTERNASIONAL DAN ECPAT THAILAND

Pada bab ini, selanjutnya peneliti akan menjabarkan awal mula ECPAT internasional dan ECPAT Thailand terbentuk, riwayat cara-cara ECPAT Thailand dalam mengatasi PSA di Thailand.

BAB IV HAMBATAN ECPAT DALAM MENGATASI PARIWISATA SEKS ANAK DI THAILAND

Pada bab ini, peneliti menjelaskan hambatan ECPAT dalam menangani isu pariwisata seks anak di Thailand

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan saran yang mencakup ide-ide dan pengetahuan terpenting dari penelitian ini, serta garis besar kontribusi potensial bagi lingkungan akademis dan pemangku kepentingan.